

Jokowi Bersama Presiden Vietnam Tanam Pohon Merawan di Istana Bogor

BOGOR (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12).

Dalam tayangan *You-Tube* Sekretariat Presiden, Presiden Nguyen bersama delegasi tiba di Istana Bogor dengan diiringi oleh pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jokowi bersama Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, melakukan penanaman pohon, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Acara penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Nguyen di Istana Kepresidenan Bogor.

Pohon yang ditanam oleh kedua pemimpin negara adalah pohon merawan. Penanaman pohon meru-

pakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan saat menyambut kunjungan tamu negara ke Istana Kepresidenan Bogor.

Setelah selesai acara penanaman Bersama, Jokowi dan Nguyen Xuan Phuc melakukan pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor dan setelahnya akan ada pernyataan pers antar kedua pemimpin negara.

Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. ● han

Polhukam

FOTO: ANTARA



KUNJUNGAN MENKES DI KUPANG

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) didampingi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya (kanan) saat “Soft Opening” Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang, Kelurahan Manulai II Kota Kupang, NTT, Kamis (22/12). RSUP dr. Ben Mboi Kupang merupakan rumah sakit terbesar dan terlengkap di NTT yang dibangun pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di NTT.

Dishub Lakukan Ramp Check dan Tes Urine Pengemudi Bus AKAP

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan ramp check atau mengecek kondisi bus antarprovinsi (AKAP) yang hendak membawa pemudik saat libur perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di setiap terminal.

“Untuk hari ini kami sudah melakukan ramp check. Jadi pada awal Desember kami sudah bersama-sama dengan BPTJ, kami melakukan ramp check terhadap keseluruhan bus yang nantinya akan dioperasikan pada Nataru ini,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin kepada awak media di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/12).

Syafrin menambahkan, pihaknya juga melakukan pengecekan ulang sebelum bus berangkat ke tujuan. Tak hanya itu, pemeriksaan kesehatan hingga tes urine pengemudi juga dilakukan sebagai langkah kejadian yang tidak diinginkan.

“Berikutnya adalah tentu sebelum bus di-

berangkatkan, selain kami melakukan cek ulang di terminal terhadap kondisi bus, juga dilakukan pengecekan kesehatan pramudi busnya. Jadi pramudi dilakukan tes urine, juga tes kondisi kesehatannya, ada pusat pelayanan kesehatan di seluruh terminal,” ujarnya.

Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, ditemukan dua dari 17 pengemudi dalam kondisi tidak sehat. Sebagai tindak lanjut pengemudi tidak diperkenankan jalan dan operator bus mengirim pengemudi cadangan.

“Contohnya kemarin yang saya pantau. Di Terminal Kalideres, dari 17 yang dilakukan tes pada saat itu, ada dua yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Oleh sebab itu yang bersangkutan kita minta tidak berangkat dan ditahan oleh Kasatpel Terminal Kalideres. Dan kemudian operator bus yang bersangkutan mengirim sopir pengganti untuk kemudian bus diberangkatkan,” tuturnya.

● mei

Tim KPK Sita Dokumen dari Ruangannya Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak

KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim.

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen anggaran dan bukti elektronik saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Rabu (21/12).

Salah satu lokasi yang digeledah yaitu ruang kerja Gubernur Jatim, Kofifah Indar Parawansa dan ruang kerja Wakilnya, Emil Dardak. Kemudian ruang Sekretaris

Daerah dan kantor Sekretariat Daerah Jatim.

Selain itu, tim KPK juga menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jatim.

KPK menduga dokumen dan bukti elektronik yang disita tersebut berkaitan dengan suap pengurusan alokasi dana hibah Pemprov Jatim.

“Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan

diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Kamis (22/12).

“Analisa dan penyitaan segera akan dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, tim KPK telah lebih dulu melakukan penggeledahan di sejumlah ruang Gedung DPRD Jatim. Tak hanya itu, KPK juga telah menggeledah rumah kediaman pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah Pemprov Jatim.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Cs

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimiyati (SD) hingga Januari 2023. Sudrajad Dimiyati merupakan tersangka suap pengurusan perkara di MA.

KPK juga memperpanjang masa penahanan tujuh tersangka lainnya, yakni, Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP).

Kemudian, empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Lantas, dua Pengacara, Theodoros Yosep Parera (YYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam perkara ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, Gazzalba, Prasetyo, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan

usaha kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. KPK sedang mendalami lebih detail rincian yang suap yang diterima para pegawai dan Hakim MA.

KPK kemudian mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA tersebut dan menetapkan satu tersangka lainnya. Adapun, tersangka baru hasil pengembangan kasus suap pengurusan perkara tersebut yakni, Hakim Yustisial Edy Wibowo (EW).

Edy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut bermain perkara di MA. Adapun, perkara yang diurus Edy Wibowo terkait upaya kasasi kepaadilan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (PT SKM) yang sedang berproses di MA. Edy Wibowo diduga menerima suap sebesar Rp3,7 miliar terkait pengurusan perkara tersebut. ● han

Hasilnya, KPK mengamankan sejumlah dokumen hingga uang tunai yang diduga berkaitan dengan kasus ini. KPK sedang menganalisa dokumen dan uang tunai tersebut dalam rangka proses penyitaan. KPK sedang mengumpulkan bukti tambahan dalam kasus ini.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim asal Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Kemudian, Staf Ahli Sahat, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator

SIDANG MEME STUPA MIRIP JOKOWI

Roy Suryo Saat Bacakan Pledoi Dihadiri Mantan Menkumham

JAKARTA (IM) – Roy Suryo membacakan sendiri pledoi atau pembelaan dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis (22/12).

Roy Suryo memakai pakaian serba gelap hadir bersama kuasa hukumnya. Di kursi pengujung, terlihat istri Roy Suryo, Ismarindayanti Priyanti. Mantan Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsuddin juga terlihat duduk di kursi pengujung.

Dalam pledoinya, Roy Suryo menyatakan mengapresiasi dua pendukungnya yang hadir di ruang sidang.

“Saya mengapresiasi khusus kepada istri saya tercinta dan pengujung atau hadirin yang hadir dalam persidangan, dan secara khusus terima kasih kepada Bapak Amir Syamsudin mantan Menteri Hukum dan HAM yang hadir di persidangan,” kata Roy saat membacakan pledoinya.

Pada sidang sebelumnya, Kamis (15/12), jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Roy Suryo dihukum 1 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp

300 juta, dan subsidi 6 bulan.

Jaksa menyebut Roy Suryo terbukti bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Kamis (22/12).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 300 juta subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Jaksa menilai, Roy terus mengingkari perbuatannya dan berpikir seolah-olah perbuatannya adalah hal yang biasa.

“Dan memberikan apresiasi terhadap kreativitas yang berlebihan yang menyinggung perasaan umat beragama,” kata jaksa.

Di sisi lain, fakta bahwa Roy belum pernah dihukum menjadi hal yang meringankan tuntutannya.

“Segi meringankan, diri terdakwa belum pernah dihukum,” kata jaksa. ● han



FOTO: ANI

SIDANG LANJUTAN HENDRA KURNIAWAN DAN AGUS NURPATRIA

Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Hendra Kurniawan (kanan) dan Agus Nurpatria (kiri) bersiap menjalani sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (22/12). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Kejagung Tangkap Buron Korupsi PT Bank PJB dan Bank Banten

JAKARTA (IM) - Tim Intelijen Jaksa Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka AH, buron tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa tahun 2017,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12).

Ia menambahkan, kredit tersebut menggunakan *Purchase Order* (PO) palsu. Selain itu, dana tersebut dipergunakan tidak sesuai tujuan kredit.

“Dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Jawa Tengah kurang dirugikan sekitar kurang lebih Rp25 miliar,” ujarnya. ● han



FOTO: ANI

RENCANA KEWAJIBAN MEMBAWA KTP UNTUK MEMBELI ELPIJI SUBSIDI

Pekerja menata gas elpiji subsidi tiga kilogram di salah satu pangkalan gas, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12). Pemerintah berencana mewajibkan pembelian gas elpiji subsidi tiga kilogram dengan membawa KTP untuk pendataan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan aturan ini dilakukan bertahap di seluruh Indonesia mulai tahun 2023.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi persyaratan dalam pasal 125 ayat 7 dan Pasal 127 ayat 2 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi PT GARUDA LANCAR ABADI berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan rencana pengalihan sebagian besar saham dalam Perseroan kepada Lim Thian Long.

Barangsiapa yang ingin mengajukan keberatan dengan maksud pengalihan saham-saham tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dapat ditunjukkan kepada:

PT GARUDA LANCAR ABADI
Gedung Jatra PAM Tower 9
Jl. Hayam Wuruk No. 33, Gambir, Jakarta Pusat
Jakarta, 23 Desember 2022
Direksi PT Garuda Lancar Abadi, Sawaludin, Lim Thian Long

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT DAINDO INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (Diluar Rapat) tertanggal 20 Desember 2022, Nomor 18, yang dibuat dihadapan ANDREAS, SH.,LL.M, Notaris di Kota Bogor, yang memuat :

- Perubahan/Perubahan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.91.160.964.500,- (Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp. 81.160.964.500,- (Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Apabila terdapat pihak-pihak yang berkepentingan atas tindakan Perseroan tersebut dapat mengajukan surat secara tertulis pada Kantor Perseroan.

TTD
Direktur Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. NIFINDO EVANO GLOBAL, berkedudukan di Jakarta Barat, tertanggal 19 Desember 2022, No. 07, yang aslinya dibuat dihadapan RAYMOND, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, telah diambil keputusan, yaitu :

- Membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 dan menunjuk Nona **NORAH CINTAMI**, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor likuidatur : Jalan Taman Grisenda Blok A1 Nomor 18, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaraninggar, Jakarta Utara.

Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan layang layang atau piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidatur berikut bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 Desember 2022
Likuidatur
PT. NIFINDO EVANO GLOBAL